

PERSYARATAN ENDORSMEN / PERPANJANGAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

MENDASARI :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 171 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan;

No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Keterangan
1	Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;	
2	Memiliki tenaga ahli, dengan syarat minimal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran / Transpotrasi Laut</li> <li>b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transpotrasi Laut;</li> <li>c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat ketrampilan; Dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat.</li> </ol>	
3	Memiliki sistem manajemen mutu; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan:</li> <li>b. Forklift;</li> <li>c. Pallet,</li> <li>d. Ship side-net;</li> <li>e. Rope sling;</li> <li>f. Rope net; dan</li> <li>g. Wire net.</li> </ol> Dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat pelabuhan setempat.	
4	Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.	

PERSYARATAN ENDORSMEN / PERPANJANGAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

No	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	Surat Permohonan Baru	
2	AKTA Perusahaan	
3	SK Kemenkumham/ AHU	
4	Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT)	
5	Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)	
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	
7	Struktur Organisasi Perusahaan	
8	KTP Penanggungjawab & NPWP	
9	NPWP Perusahaan	
10	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
11	Sertifikat Standar (OSS)	
12	Surat Keabsahan dokumen	